



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 216358

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 985.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/350 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 711.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/99 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 7400 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, WARISAN Rp. 74.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.000.000

1. MOTOR, HONDA NEW PCX 150 CBS (V1J02Q32L0 A/T) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA (JB 420 G.V JLX AT) Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 113.325.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 113.776.593

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.313.701.593

III. HUTANG Rp. 120.984.689

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.192.716.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.